

---

**ANALISIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026 DALAM PERSPEKTIF EVIDENCE  
BASED POLICY****Denny Iswanto\***Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia  
Email: dennyiswanto@gmail.com**\*Penulis Korespondensi**

---

**ABSTRAK**

Penerapan Evidence-Based dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia masih menjadi hal yang baru dan penting diimplementasikan untuk dapat menekan dominasi kepentingan politik dan lebih mengedepankan kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penerapan evidence-based policy menjadi urgensi dalam agenda perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Berbasis Bukti yang telah diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dokumen perencanaan ini telah mengimplementasikan evidence-based dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Tuban, namun secara quality of evidence masih perlu ditingkatkan terutama pada level puncak yaitu penggunaan riset dan artikel ilmiah untuk dapat dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan berbasis bukti dapat meningkatkan ketepatan program pembangunan dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik. Adanya kesadaran dan kemauan dalam menerapkan evidence-based policy, para pemangku kepentingan dapat menggunakan data dan informasi sebagai bukti yang lebih terarah, konkrit, membumi dan peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat.

**Kata Kunci:** *perencanaan pembangunan, evidence-based, RPJMD*

---

**ANALYSIS OF REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLANS 2021-2026 IN  
TUBAN REGENCY FROM EVIDENCE BASED POLICY'S PERSPECTIVE****ABSTRACT**

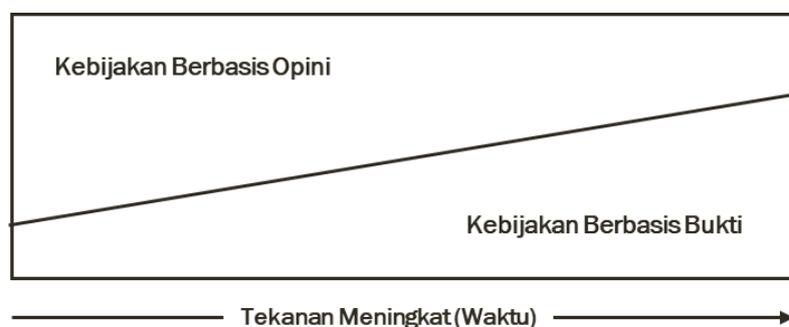
*The application of Evidence-Based in policy formulation and development planning in Indonesia is still new and important to be implemented to reduce the dominance of political interests and prioritize public interests in the policy-making process. The implementation of evidence-based policy is an urgency in the regional development planning agenda, especially in Tuban Regency. This study aims to understand the evidence-based policies that have been implemented in the RPJMD of Tuban Regency for 2021-2026. This type of research is descriptive qualitative research with a secondary data analysis method. The results showed that this planning document has implemented evidence-based planning development in Tuban Regency. However, the quality of evidence still needs to be improved, especially at the top level, which are the use of research and scientific articles to be considered in determining regional development policies. Evidence-based development can improve the accuracy of development programs and increase the effectiveness of policy implementation in implementing public services. With the awareness and willingness to implement evidence-based policy, stakeholders can use data and information as evidence that is more focused, concrete, grounded, and sensitive to society issues.*

**Keywords:** *development planning, evidence-based, RPJMD*

**PENDAHULUAN**

Implementasi otonomi daerah di Indonesia saat ini, setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten bahkan sampai pada pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk merencanakan, membangun dan mengatur berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam rangka membangun kinerja dengan tujuan pemenuhan pelayanan publik (Iswanto, 2021a). Demi tercapainya tujuan pembangunan negara dalam meningkatkan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala, disusunlah dokumen perencanaan sebagai bagian kontribusi terhadap pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan upaya menyeluruh yang berfokus pada keberlanjutan dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Daerah sebagai komponen penting dalam pembangunan nasional, dimana pengelolaan pembangunan daerah yang efektif memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu dan mendasar dalam upaya pembangunan nasional (Ramadanti, 2019).

Keterpaduan pelaksanaan pembangunan tersebut dapat efektif mengurai masalah di masyarakat, perencanaan pembangunan daerah akan lebih menyentuh akar permasalahan apabila pembangunan dilaksanakan berbasis bukti (*evidence-based*) dengan melibatkan stakeholder terkait dalam menemukan bukti sebagai dasar pembuatan kebijakan (Kang-Yi & Page, 2022; Nomaini et al., 2021). Implementasi kebijakan berbasis bukti dalam sistem perencanaan pembangunan, terutama di Indonesia merupakan sesuatu yang inovatif dan memiliki signifikansi yang besar dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, orientasi layanan publik, dan legitimasi (Adam et al., 2018). Kebijakan publik yang disusun oleh para *policy maker* dengan menerapkan *Evidence-Based* cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu, berbeda dengan kebijakan yang didasarkan pada pendapat atau subjektivitas para pembuat kebijakan, yang mungkin mengalami penurunan kepercayaan seiring berjalannya waktu (Sutcliffe & Court, 2005), seperti pada Gambar 1.



Gambar 1: Dinamika *Evidence Based Policy*  
 Sumber: Sutcliffe & Court (2005)

Penerapan *Evidence-based Policy* (EBP) mendorong pemerintah dan para *policy maker* untuk memasukkan data dan informasi objektif sebagai bagian dari pertimbangan mereka dalam merumuskan kebijakan (Gallego & Font, 2021). EBP juga muncul sebagai langkah untuk mengurangi dominasi faktor-faktor politik dalam proses pengambilan kebijakan, dengan lebih menekankan pada kepentingan masyarakat. Berbagai jenis bukti dapat disatukan dalam proses formulasi kebijakan publik, termasuk hasil penelitian ilmiah, riset, informasi, ide-ide, pendapat ahli, pertimbangan politik, dan bukti-bukti dan data ekonomi (Head, 2008).

Perencanaan pembangunan khususnya di daerah masih ditemukan berbagai kendala selama ini, terutama mengenai kualitas perencanaan berbasis EBP masih menjadi tantangan di Indonesia. Di Indonesia, penerapan Kebijakan Berbasis Bukti (EBP) menghadapi beberapa tantangan besar, yang terdiri dari enam tantangan utama, yaitu minimnya pendanaan; kurangnya dukungan kebijakan yang mendorong perencanaan pembangunan mengintegrasikan EBP; kurangnya kompetensi *policy maker* dalam penggunaan EBP; keterbatasan interaksi antar *stakeholders* terkait dalam proses formulasi kebijakan publik; minimnya ketersediaan dan akses terhadap data; dan kualitas riset dan analisis yang masih rendah (Wasono, A., & Maulana, 2018). Hambatan-hambatan ini secara kolektif menghambat implementasi EBP yang efektif di Indonesia dan menyoroti perlunya upaya yang tepat sasaran untuk mengatasi setiap tantangan guna meningkatkan pengambilan keputusan berbasis bukti di negara ini.

Upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan perlu untuk mengadopsi Kebijakan Berbasis Bukti (EBP) sebagai pendekatan dasar dalam perumusan kebijakan. Berbagai jenis data menunjukkan tingkat kualitas yang berbeda-beda, mulai dari sumber dengan kualitas rendah seperti pendapat para ahli hingga sumber dengan kualitas sedang seperti laporan, temuan dari studi kelompok, dan Uji Coba Terkontrol Secara Acak (*randomized Controlled Trials/RCT*), dan akhirnya, hingga sumber dengan kualitas lebih tinggi seperti artikel ilmiah dan tinjauan sistematis (Monahan, 2023).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai instrumen yang berharga untuk mengevaluasi sejauh mana bukti telah digunakan dalam perumusan strategi pembangunan daerah (Iswanto, 2021b). RPJMD merupakan acuan utama dan peta jalan pengelolaan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini tidak hanya memberikan panduan kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tetapi juga memainkan peran penting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Terlepas dari pemanfaatan kapasitas tersebut, Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menetapkan bukti sebagai faktor utama yang mendorong pembangunan. Menurut publikasi (Sutcliffe & Court, 2005) dari *Overseas Development Institute (ODI)*, mereka menyoroti faktor "5 S" yang menimbulkan kesulitan dalam penerapan kebijakan berbasis bukti (EBP) dalam penyusunan kebijakan publik diantaranya adalah *speed, superficiality, spin, secrecy, dan scientific ignorance*.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tuban masih sulit dalam menerapkan EBP, terutama dalam pengelolaan data. Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah dengan kemiskinan yang masih tinggi, namun belum memiliki *database* terpadu kesejahteraan sosial yang memadai (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2021). Penerapan kebijakan berbasis bukti menjadi dasar penentuan kebijakan daerah menjadi penting untuk dapat membuat kebijakan agar lebih tepat sasaran. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai EBP dalam pembangunan daerah sebagai acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah di Kabupaten Tuban.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari metode analisis deskriptif adalah untuk melakukan penyelidikan sistematis terhadap isu-isu dan fakta yang terkait dengan perencanaan pembangunan, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data serta mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat *quality of evidence-based*. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data sekunder yang merupakan suatu metodologi penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama (Iswanto, 2022). Data yang dianalisis adalah RPJMD Perubahan Kabupaten Tuban 2021-2026 dimana dokumen ini menjadi penting sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun di Kabupaten Tuban. Data dalam dokumen tersebut berupa data statistik dan data lapangan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia dan juga keamanan dan ketentraman. Metode analisis ini mengubah data, entah dalam bentuk persentase atau angka mutlak, menjadi analisis yang bermakna secara kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kualitas perencanaan berdasarkan bukti yang dianalisis.

Hasil interpretasi kualitatif terhadap data sekunder yang berhasil dihimpun dianalisis secara detail dengan mencoba menelaah data-data, pendapat ahli, dan juga hasil penelitian dan kajian ilmiah dalam berbagai sumber yang digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan dalam dokumen perencanaan RPJMD. Hal ini merupakan salah satu aspek memperhatikan kondisi yang ada. Hasil analisis ini juga akan memberikan gambaran yang tidak memihak mengenai potensi permasalahan yang harus ditangani secara proaktif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, dengan memanfaatkan wawasan dan deskripsi yang diperoleh dari analisis data empiris. Tujuan utama pemanfaatan data sekunder melibatkan pemilihan informasi relevan dari sumber yang disediakan oleh lembaga atau lembaga yang berwenang dan selanjutnya melakukan pemrosesan yang sistematis dan obyektif untuk mengekstraksi wawasan yang diperlukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Tuban telah mengintegrasikan bukti-bukti dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini tercermin dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), beragam data *time series* telah dimanfaatkan untuk menganalisis kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir. RPJMD dapat dianggap sebagai salah satu hasil dari pendekatan kebijakan yang berlandaskan pada bukti-bukti yang tersedia (Handrisal, 2019).

Para perumus kebijakan baik dari politisi maupun dari segala unsur pemerintahan diberikan pemahaman mengenai signifikansi dan urgensi penggunaan bukti dalam proses perumusan kebijakan. Adanya integrasi bukti-bukti sejak awal perumusan kebijakan, penundaan yang berlarut-larut dan waktu bertahun-tahun yang dihabiskan untuk terlibat dalam isu-isu publik dapat dihindari (Saltelli & Giampietro, 2017). Merangkul bukti ilmiah memberdayakan pemangku kepentingan untuk mendapatkan solusi yang lebih nyata, tepat sasaran, beralasan, dan responsif terhadap tantangan publik. Implementasinya, pemerintah pusat telah memulai beberapa inisiatif dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengalokasikan anggaran penelitian kepada mitra, kementerian, dan lembaga non-kementerian, sumber daya yang dialokasikan untuk tujuan ini masih terbatas. Dalam pembahasan kali ini akan dianalisis penggunaan *evidence-based* dan tingkatannya dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

### **Analisis Penggunaan *evidence-based* pada Dokumen Perencanaan Daerah**

Penggabungan praktik berbasis bukti dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berkelanjutan dan efektif. Penilaian analitis ini menggali signifikansi, manfaat, dan potensi tantangan dalam memanfaatkan pendekatan berbasis bukti dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD dapat berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan pembangunan daerah telah mengintegrasikan bukti-bukti dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pengecekan terhadap RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dapat disimpulkan bahwa dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut, penggunaan bukti sebagai salah satu komponen dalam penyusunan rencana pembangunan sudah dilaksanakan tetapi terbatas, seperti pada Tabel 1.

Bukti yang dipakai dalam penyusunan RPJMD pada table diatas menjadi *baseline* untuk menentukan target dan program atau kegiatan. Pembuatan kebijakan berbasis EBP mendorong pembuat kebijakan untuk mencari bukti terbaik yang tersedia, memprioritaskan hasil yang dapat dibuktikan dan dibuktikan ketika merancang kebijakan (Shim & Shin, 2022). RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026 pada urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pemerintah Daerah secara tidak langsung menyiratkan niat pemerintah untuk memajukan sektor teknologi dan inovasi melalui berbagai riset dan studi untuk mengukur indeks, dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah tersebut di tingkat nasional. Ini menggambarkan pemahaman pemerintah Kabupaten Tuban akan pentingnya riset sebagai bukti.

Tabel 1: Analisis implementasi *Evidence Based* pada RPJMD Tuban 2021-2026

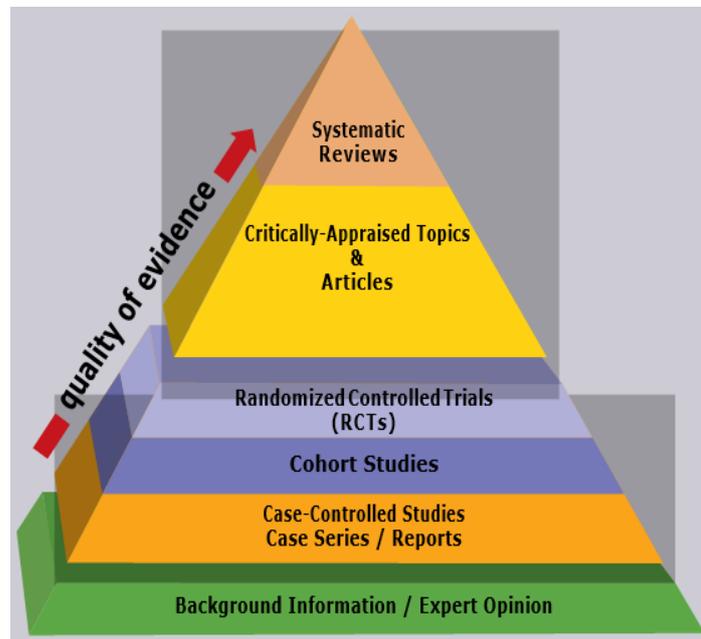
No.	<b>EBP pada dokumen perencanaan</b>	<b>Review RPJMD Tuban 2021-2026</b>
1.	Visi-misi kepala daerah diterjemahkan dalam RPJMD dengan menggunakan data hasil riset dan data statistik.	Visi-misi kepala daerah terpilih telah diterjemahkan ke dalam program dan menggunakan data-data stasistik yang relevan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan
2.	Data-data yang mendukung peta permasalahan dan isu strategis ( <i>time series analysis</i> ).	Data telah digunakan sebagai dasar penentuan isu strategis di dalam 29 urusan pemerintah daerah yang telah dipetakan sesuai dengan misi dan OPD pengampu isu strategis tersebut
3.	Data hasil kajian lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Misalnya, BPS, KPU, dll.	Telah digunakannya hasil kajian berupa data dari BPS, data RTRW Kabupaten Tuban, data dari masing-masing unit kerja/OPD, Perda, hasil kajian Kelayakan BUMD, KLHS
4.	Penyusunan indikator pencapaian program berdasarkan data-data yang tersedia.	Penyusunan indikator telah sesuai pencapaian program berdasarkan data-data yang tersedia.

Upaya penguatan bukti sebagai alat evaluasi pembangunan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa inisiatif evaluasi seperti penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), audit BPK, audit BPKP, penilaian Kemenpan dan RB. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menunjukkan daya saing di tingkat nasional.

Pada aspek penilaian SAKIP, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengalami peningkatan sejak dilaksanakan penilaian dari tahun 2019 dengan skor penilaian 69,67 dan naik ditahun 2020 menjadi 71,5 dan pada 2020 mengalami kenaikan sehingga menjadi 72,41. Pada penilaian Opini BPK sejak tahun 2018-2020 selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada aspek keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material. Pada aspek Reformasi Birokrasi yang dinilai berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) telah menunjukkan angka yang fluktuatif di tiga tahun terakhir. Tahun 2018 IRB Kabupaten Tuban adalah sebesar 61,76 dan naik di tahun 2019 menjadi 66,75. Tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 65. Dengan adanya berbagai indikator ini, ketercapaian pembangunan daerah dapat dimonitoring (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2021)

### **Quality of Evidence pada Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026**

Berbagai bukti seperti hasil riset dan informasi yang diperoleh dalam konsultasi publik, informasi yang bersumber dari internet, dan publikasi dokumen seperti evaluasi program/kebijakan dan hasil analisis statistik dapat dipakai untuk memengaruhi pengambilan kebijakan (Bowen & Zwi, 2005), seperti pada Gambar2. Bahkan pendapat ahli, agenda pemerintah, dan implikasi terhadap anggaran negara termasuk bukti yang bisa dipakai dalam memengaruhi kebijakan.



Gambar 2: Kualitas penggunaan *evidence-based*

Sumber: Bowen & Dwi (2005)

Setiap jenis bukti memiliki tingkat kualitas yang beragam, mulai dari yang memiliki kualitas rendah seperti pendapat pakar, hingga kualitas menengah seperti laporan, hasil studi kelompok, dan uji klinis acak (RCTs), serta kualitas tinggi seperti artikel ilmiah dan tinjauan sistematis. Sesuai dengan hierarki kualitas bukti yang disebutkan di atas, tinjauan sistematis adalah yang paling tinggi tingkat kualitasnya, sementara pendapat ahli berada pada tingkat terendah.

Secara umum, dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 telah mengimplementasikan EBP yang digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Namun secara kualitas penggunaan bukti masih perlu ditingkatkan dalam penggunaan hasil kajian ilmiah sebagai dasar penentuan kebijakan. Level paling dasar yaitu Penggunaan opini pakar (*Expert opinion*) telah digunakan dalam dokumen perencanaan RPJMD ini, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2: Penggunaan Pendapat ahli dalam RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026

<b>Pendapat Ahli</b>	<b>Tahun</b>	<b>Sumber</b>
Robbins dan Coulter	2005	Robbins, Stephen P. & Mary Coulter. 2005. Manajemen. Edisi ke-7. Jilid 2. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : PT Indeks.
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)	2014	Indonesia Most Livable City Index. 2014. Jakarta: Ikatan Ahli Perencana Indonesia.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendapat ahli telah digunakan sebagai salah satu komponen perencanaan. Pendapat Robbins dan Coulter digunakan untuk melihat pengertian dan empat fungsi perencanaan, sedangkan pendapat IAP digunakan sebagai acuan menganalisis indikator-indikator perencanaan pembangunan. Pendapat ahli telah digunakan dalam perumusan kebijakan RPJMD walaupun masih terbatas.

Pada tingkat kedua, yaitu laporan. Penggunaan laporan digunakan pada laporan-laporan dinas terutama Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) setiap Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun kebelakang mengenai data-data tertentu misalnya, dan lain sebagainya.

Tabel 3: Jenis Laporan dalam RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026

<b>Jenis Laporan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Sumber</b>
Laporan Realisasi Anggaran 2016 – 2020	2016-2020	BPPKAD
Laporan Neraca Kabupaten Tuban	2016-2020	BPPKAD
Laporan LKjIP (Setiap OPD)	2016-2020	Semua OPD

Tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaan laporan teknis setiap OPD dalam perencanaan pembangunan telah dilaksanakn dengan baik dan rinci. Laporan tersebut telah memenuhi standar penggunaan EBP pada tahap kedua dari bawah dan telah diimplementasikan dengan baik. Setiap komponen urusan pembangunan telah dilengkapi dengan data laporan masing-masing urusan oleh perangkat daerah.

Pada tingkat ketiga, yaitu hasil studi *kohort*. Studi ini merupakan bentuk studi longitudinal tertentu yang mengambil sampel dari sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang menentukan yang biasanya mereka yang mengalami peristiwa umum dalam periode tertentu. Dalam RPJMD ini studi kohort dilakukan dalam bentuk kajian terhadap lingkungan, kajian pembagian peran OPD di Kabupaten Tuban, penggunaan data-data *time series* BPS dan kajian penelitian dan pengembangan daerah lainnya. Pada tingkat keempat, *Randomized Controlled Trials* (RCT) yang merupakan metode eksperimental yang dilakukan dalam menjalankan sebuah program/penelitian.

Tabel 4: Jenis Uji Studi Kohort yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026

Jenis Uji	Tahun	Sumber
Indeks Kualitas Air	2016-2020	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara	2016-2020	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	2016-2020	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2016-2020	Dinas Sosial P3A
Indeks Keparahan Kemiskinan	2016-2020	Dinas Sosial P3A
Indeks Pembangunan Manusia	2016-2020	Dinas Sosial P3A
Indeks Pemberdayaan Gender	2016-2020	BPS Kab. Tuban

Tabel 4 menunjukkan bahwa penerapan metode RCT biasanya dilakukan pada program nyata untuk masyarakat luas, karena hal tersebut digunakan untuk mengetahui evaluasi dampak dari program yang dijalankan. RCT yang digunakan berupa uji, yaitu uji kelayakan kualitas udara dan air, pengujian indeks kemiskinan dan pemberdayaan gender. Hal ini dimaksudkan untuk dapat melihat implementasi EBP berdasarkan pada berbagai uji yang dilakukan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah.

Pada level kelima dan keenam yaitu ulasan sistematis atau riset digunakan sebagai EBP dalam RPJMD belum nampak. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026 menyatakan bahwa riset belum sepenuhnya menjadi isu strategis dan pencapaian sasaran prioritas daerah. Pemanfaatan hasil riset masih belum optimal dan belum memiliki pusat jejaring inovasi di daerah (Susanti, 2022). Hal ini perlu untuk mendapat perhatian dikarenakan bagaimana pembuat kebijakan memanfaatkan evaluasi kebijakan untuk mengimplementasikan dan memantau kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis EBP. Kurangnya penelitian mendalam dalam perumusan kebijakan publik masih menjadi tantangan besar dalam pemerintahan modern. Kekurangan ini sering kali menghasilkan kebijakan yang kurang informasi, tidak efektif, atau bahkan kontraproduktif. Tanpa dasar data empiris yang kuat, pembuat kebijakan mungkin akan mengandalkan sudut pandang ideologis atau partisan, bukti yang bersifat anekdot, atau pertimbangan politik jangka pendek. Akibatnya, konsekuensi jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut sering kali tidak terduga, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi masyarakat (van Dijk et al., 2021). Sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk memprioritaskan pengambilan keputusan berbasis bukti dan berinvestasi dalam penelitian komprehensif untuk memberikan masukan bagi pengembangan dan implementasi kebijakan yang benar-benar memberikan kepentingan terbaik bagi masyarakat, mendorong sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Kualitas pengaplikasian EBP dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tuban hanya memenuhi empat indikator paling bawah dari konsep EBP yaitu pendapat pakar, hingga kualitas menengah seperti laporan, hasil studi kelompok, dan uji klinis acak (RCTs) dan belum memenuhi *top of EBP* yaitu tinjauan sistematis berbasis riset. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban adalah belum adanya kesadaran akan pentingnya

EBP sebagai dasar penentuan kebijakan daerah sehingga indikator-indikator EBP belum terdapat dalam dokumen perencanaan. Hal ini dapat diatasi dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai kepanjangan tangan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) di daerah dalam mendukung riset sebagai salah satu pijakan penentuan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 (Saksono, 2021). Kebijakan tersebut menginstruksikan agar setiap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota membentuk badan riset dan inovasi daerah, baik melebur dengan OPD yang sudah ada maupun OPD baru diluar OPD yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk dapat mengimplementasikan EBP di tingkat daerah sebagai kepanjangan tangan BRIN dalam melaksanakan dan mendorong riset dan inovasi berbasis *science-based policy* pada tingkat daerah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan Berbasis Bukti dalam RPJMD Kabupaten Tuban, penggunaan EBP telah diimplementasikan, akan tetapi secara hierarki kualitas dari EBP harus ditingkatkan lagi dalam penggunaan data hasil kajian ilmiah berupa kajian ilmiah dan laporan penelitian dari berbagai sumber terpercaya agar perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan riil di lapangan sehingga EBP ini menjadi urgensi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Tidak hanya itu, jika diperlukan dilakukan upaya penelitian lebih lanjut bisa dilakukan sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada untuk berkolaborasi. Perlu adanya badan riset dan inovasi daerah yang dibentuk dalam mengaplikasikan EBP dalam setiap pembangunan daerah berbasis *science-based policy*. Adanya prioritas penggunaan bukti ilmiah, pemangku kepentingan dapat menghasilkan ide-ide yang lebih konkret, terarah, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan responsif terhadap isu-isu public

## REFERENSI

- Adam, C., Steinebach, Y., & Knill, C. (2018). Neglected challenges to evidence-based policy-making: the problem of policy accumulation. *Policy Sciences*, 51(3), 269–290. <https://doi.org/10.1007/s11077-018-9318-4>
- Bowen, S., & Zwi, A. B. (2005). Pathways to “evidence-informed” policy and practice: A framework for action. *PLoS Medicine*, 2(7), 0600–0605. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020166>
- Gallego, I., & Font, X. (2021). Changes in air passenger demand as a result of the COVID-19 crisis: using Big Data to inform tourism policy. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(9), 1470–1489. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1773476>
- Handrisal, R. A. F. (2019). *AKUNTABILITAS PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Rangani Ade Febrian & Handrisal*. 3(01), 1–35.

- Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence-based policy. *Australian Journal of Public Administration*, 67(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x>
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember. (2021). *PDPM ITS Turut Berkontribusi Mengevaluasi Persoalan Pembangunan di Kabupaten Tuban*. <https://www.its.ac.id/Drpm/Id/2021/04/23/Pdpm-Its-Turut-Berkontribusi-Mengevaluasi-Persoalan-Pembangunan-Di-Kabupaten-Tuban/>.
- Iswanto, D. (2021a). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di kabupaten Tuban)*. University of Brawijaya.
- Iswanto, D. (2021b). Realizing Inclusive Public Services: “Lapo Bra” Innovation in Building a Literacy Culture for Persons with Disabilities in Malang. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, & Social Inclusion's Studies*, 4(1), 71–80. <https://salasika.org/index.php/SJ/article/view/87/47>
- Iswanto, D. (2022). SMART VILLAGE GOVERNANCE THROUGH THE VILLAGE INFORMATION SYSTEM IN TUBAN REGENCY. *Natapraja*.
- Kang-Yi, C. D., & Page, A. (2022). Purpose Formulation, Coalition Building, and Evidence Use in Public–Academic Partnerships: Web-Based Survey Study. *JMIR Human Factors*, 9(1). <https://doi.org/10.2196/29288>
- Monahan, M. (2023). *Effectiveness of Psychoeducation on Burden among Family Caregivers of Adults with Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-Analysis*. 2023.
- Nomainsi, F., Thamrin, M. H., & Bafadhal, O. M. (2021). Indeks Ketahanan Lingkungan sebagai Bukti Pembuatan Kebijakan: Sebuah Sosialisasi Evidence-based Policy di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 382–390. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1849>
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026*. <https://tubankab.go.id/files/RPJMD/rpjmd-tahun-2021-2026.pdf>
- Ramadanti, V. (2019). Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Publik*, 1–10.
- Saksono, H. (2021). BRIDA: Urgensi Pembentukan dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20, 178–196. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.290>
- Saltelli, A., & Giampietro, M. (2017). What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? *Futures*, 91, 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.11.012>
- Shim, H., & Shin, K. (2022). Empirical analysis of evidence-based policymaking in r&d programmes. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su14010311>
- Susanti, T. (2022). IMPLEMENTASI PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD PERIODE 2021-2026 SEBAGAI UPAYA UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tuban. *Publika*, 10(1), 231–244.
-

- Sutcliffe, S., & Court, J. (2005). Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries? *Young, November*, 1–50.
- van Dijk, J., Leopold, A., Flerlage, H., van Wezel, A., Seiler, T. B., Enrici, M. H., & Bloor, M. C. (2021). The EU Green Deal's ambition for a toxic-free environment: Filling the gap for science-based policymaking. *Integrated Environmental Assessment and Management*, 17(6), 1105–1113. <https://doi.org/10.1002/ieam.4429>
- Wasono, A., & Maulana, M. (2018). Tinjauan kritis perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia. *Laporan Hasil Penelitian, Working Paper*.